

ABSTRACT

Guaranteed legal certainty of land ownership will be realized by conducting land registration as regulated in Article 19 of the BAL. To accelerate ownership of the number of registered parcels the government implements the PTSL program. One member of the PTSL acceleration adjudication committee is the village head where the land object area is registered.

The purpose of this study was to determine the role of the Village Head in assisting the implementation of the PTSL program in Kemanggungan Village, Tarub District, Tegal Regency. To find out also the obstacles that arise in the PTSL program in Kemanggungan Village, Tarub District, Tegal Regency.

The research method used in this writing is empirical juridical with analytical descriptive approach, through primary data collection obtained by interviews and field observations with sources and secondary data obtained from legislation and literature. To draw conclusions from this paper, research uses qualitative analysis methods.

The results showed that the role of the Village Head in the implementation of the PTSL program was to act as the leader of the lowest administrative unit, which was in direct contact with the community, helping to prepare work maps, village community land ownership data, as an informant on problematic or disputed land parcels, and Village government assets in its territory. Obstacles that occur in the implementation of PTSL are the lack of a sense of responsibility from the committee and participants, such as the installation of the boundary markers of the committee is not timely and participants are also not present in the installation of the boundary pillar and incomplete requirements documents.

The PTSL program in Kemanggungan Village, Tarub District, Tegal Regency has run well. The Tegal Regency Land Office and the Village Head and their apparatus help each other to meet the specified targets.

Keywords: *Role, Village Head, PTSL*

ABSTRAK

Jaminan kepastian hukum kepemilikan tanah akan terwujud dengan melakukan pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UUPA. Untuk mempercepat kepemilikan jumlah bidang tanah yang terdaftar pemerintah melaksanakan program PTSL. Salah satu anggota dari Panitia Ajudikasi percepatan PTSL adalah Kepala Desa dimana wilayah objek tanah didaftar.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Kepala Desa dalam membantu pelaksanaan program PTSL di Desa Kemanggungan Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal. Untuk mengetahui juga hambatan yang muncul dalam program PTSL di Desa Kemanggungan Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu *yuridis empiris* dengan pendekatan *deskriptif analitis*, melalui pengumpulan data primer yg diperoleh dengan wawancara dan hasil observasi lapangan dengan narasumber dan data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur. Untuk menarik kesimpulan dari penulisan ini, penelitian menggunakan metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Kepala Desa dalam pelaksanaan program PTSL adalah berperan sebagai pimpinan unit administrasi yang paling bawah, yang berhubungan langsung dengan masyarakat, membantu menyiapkan peta kerja, data kepemilikan tanah masyarakat desa, sebagai informan terhadap bidang-bidang tanah yang bermasalah atau bersengketa serta aset pemerintah Desa di wilayahnya. Hambatan yang terjadi pada pelaksanaan PTSL adalah kurangnya rasa tanggung jawab dari pihak panitia maupun peserta, seperti pemasangan tugu tanda batas panitia tidak tepat waktu dan peserta juga tidak hadir dalam pemasangan tugu batas tersebut dan dokumen persyaratan yang tidak lengkap.

Pelaksanaan program PTSL di Desa Kemanggungan Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal sudah berjalan baik. Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal beserta Kepala Desa dan perangkatnya saling membantu agar memenuhi target yang sudah ditentukan.

Kata kunci : Peran, Kepala Desa, PTSL